

EVALUASI PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA PADANG PANJANG

Shinta Angellina^{1*}, Rilly Yane Putri², Pagdya Haninda Nusantri Rusdi³

^{1,2,3,4}Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Email Korespondensi: shintaangellina03@gmail.com

Submitted: 09-10-2023, Reviewed: 03-11-2023, Accepted: 11-11-2023

ABSTRACK

The Quality Family Villages (KB) aims to improve the quality of life of the community at the village level. This study aimed to determine the evaluation of the Implementation of the quality family village (KB) program in the working area of the padang panjang city health center. This research is descriptive in nature with a qualitative approach. Purposive sampling method had been used to choose the samples. It was Padang Panjang. This research data was obtained from the results of in-depth interview with officers who had direct contact in the KB village area and 5 informants. The conclusion of this research is that the family planning village program in padang panjang city is not yet optimal, there are still obstacles such as a lack of human resources, a lack of community interest in participating in the activities carried out. This program should increase human resources. And the facilities are also not adequate, while the infrastructure is. The implementation of the three family planning villages still has its own problems in carrying out its activities.

Keywords: Family Planning Village, Implementation of Family Planning Village

ABSTRAK

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Panjang. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *Kualitatif*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan pada di Kota Padang Panjang. Data Penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan petugas yang berhubungan langsung di wilayah kampung KB dan informan sejumlah 5 Orang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program kampung KB di Kota Padang Panjang belum optimal, masih terdapat kendala seperti kurangnya SDM kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Program ini sebaiknya ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta penambahan SDM. Dan untuk sarana juga belum memadai, sedangkan prasarananya sudah. Pelaksanaan tiga kampung KB masih memiliki masalah masing-masing dalam melaksanakan kegiatannya

Kata Kunci : Kampung KB, Pelaksanaan Kampung KB

PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan BKKBN, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen atau setara dengan jumlah penduduk di Singapura.

Padahal, pemerintah menargetkan pertumbuhan populasi dapat ditekan 1,1 persen sedangkan tingkat kelahiran setiap perempuan di Indonesia pada tahun 2010-2015 rata-rata 2-3 anak. Dengan laju seperti itu diprediksi pada tahun 2020-2030 nanti, penduduk berusia produktif akan sangat besar jumlahnya. Disisi lain jumlah penduduk lanjut usia dan anak-anak justru sedikit. Dengan pertumbuhan seperti itu maka ledakan penduduk tidak bisa dihindari lagi (BKKBN, 2019).

Kampung KB merupakan salah satu terobosan yang di desain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun atau kampung yang pemilihannya berdasarkan kriteria dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sehingga masing-masing wilayah kampung KB memiliki karakteristik yang berbeda. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB. Di Indonesia total Kampung KB sudah 14160, Banyak faktor yang menghambat

BKKBN dalam menjalankan program KB, faktor utama menjadi penghambat program KB adalah sosialisasi yang kurang baik kepada masyarakat.

Dalam Penelitian Arum Wahyuningsih (2012), tentang Kajian Karakteristik Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung KB di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki karakteristik yang sesuai dengan kriteria BKKBN sebesar 89% diantaranya tingginya jumlah keluarga miskin, kriteria wilayah merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS), partisipasi sekolah rendah, tersedianya data kependudukan yang akurat, partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga rendah, capaian program KB rendah, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) rendah. Faktor yang mempengaruhi keikutsertaan KB berdasarkan uji *Chi Square* dan Regresi Logistik Berganda adalah pengetahuan dibuktikan dengan ($p=0,000$) dengan *Relative Risk (RR)* sebesar 6,14 dan ($Sig. = 0,000$) yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keikutsertaan KB. (Karakteristik et al., 2012)

Dalam Penelitian Siti Nunung Nurjannah (2018), tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kabupaten Kuningan secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor. Kemudian, beberapa kegiatan Program



KB Sebagian besar telah dilakukan seperti penyuluhan, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga dan UUPKS. Hanya saja dari penelitian kualitatif ditemukan beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antar SDM yang menjalankannya. (Nurjannah & Susanti, 2018)

Di Sumatera Barat, kampung KB telah terbentuk di semua kota atau kabupaten (19 kota dan kabupaten) telah terbentuk kampung KB. Target kampung KB pada 2018 ialah setiap kecamatan di Sumatera Barat terbentuk satu kampung KB. Sampai dengan akhir tahun 2018, total yang sudah terbentuk adalah 398 kampung KB. Total kecamatan yang ada di Sumatera Barat 188 kecamatan, yang dimana setiap kecamatan sudah memiliki satu kampung KB. (BKKBN,2018)

Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki 2 kecamatan, dan 4 wilayah kerja Puskesmas. Yang dimana sudah ada 3 Kampung Keluarga Berencana. Satu kecamatan sudah ada yang memiliki 2 kampung KB. Di kecamatan Padang Panjang Timur terdapat 2 Kampung KB, yakni Kubu Gadang di bawah Wilayah Kerja Puskesmas Gunung. Koto Katiak di bawah Wilayah Kerja Puskesmas Koto Katiak. Dimana kampung KB yang terbentuk pertama kalinya di Kubu Gadang, kelurahan Ekor Lubuk padabulan Mei 2016 dan di Koto Katiak pada bulan Agustus 2017. Sedang di Kecamatan Padang Panjang Barat baru di Tanah Hitam di Wilayah Kerja Puskesmas Kebun Sikolos. Pada Tahun 2016 Padang Panjang Membentuk 1 Kampung Keluarga Berencana, Dan pada Tahun 2017 membentuk 2 Kampung Keluarga Berencana, Sedangkan pada

Tahun 2018 tidak ada pembentukan Kampung Keluarga Berencana dan ada satu Wilayah Kerja Puskesmas Busur yang tidak memiliki Kampung Keluarga Berencana.

Wawancara juga dilakukan dengan Koordinator Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan EkorLubuk, beliau mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta KB dan respon Masyarakat setelah terbentuknya Kampung KB di Kubu Gadang sudah mencapai target dan pemerintahan akan selalu meningkatkan itu, begitu juga dengan desa Koto Katiak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan kampung keluarga berkualitas (KB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (Indepth Interview). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang Panjang dengan informan 5 orang. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan Teknik analisis data interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Input Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang didapatkan program KB yang dilaksanakan di kampung KB untuk meningkatkan KB serta jumlah peserta KB yaitu mengadakan safari KB dan kampung KB serta dibentuknya program-program lain seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK KB dan UPPKS namun program ini belum optimal. Kebijakan di kampung kb yaitu dilakukan penyuluhan tentang KB kemudian dilakukan pelayanan safari KB



setiap peserta KB Yang ingin mendapatkan pelayanan baik yang baru maupun yang ulangan dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepreatatif, meskipun kebijakan jugamengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Pudjirahardjo'dan & Sopacua, 2016)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yang dilakukan oleh Maharto (2017) tentang Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon yang menyatakan keterbatasan jumlah pengelola/penyuluh, partisipasi masyarakat masih rendah serta keterbatasan sarana pendukung, kurangnya pembinaan terhadap institusi masyarakat, kurangnya sosialisasi keluarga sejahtera, dan respon dari masyarakat dan pengelola program belum maksimal. (Maharto, 2017)

Menurut asumsi peneliti, kebijakan pemerintah tentang program kampung KB belum sesuai harapan. Karena masih ada beberapa program yang tidak berjalan. Tidak berjalannya program di kampung KB dikarenakan kurangnya

minat dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Karena tautan ekonomi Masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan dikampung KB. Maka diperlukan peran dari petugas PLKB dan kader untuk lebih mensosialisasikan program Kampung KB kepada masyarakat agar menumbuhkan minat masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan yang diadakan oleh petugas KB.

Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara kepada informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih kurangnya petugas PLKB di padang panjang. Seluruh informan menyatakan Seharusnya 2 orang Petugas PLKB bertanggung jawab untuk 1 kecamatan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian ndanga (2016) dimana Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kota Batu tentunya tidak terlepas dari ketersediaan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang dimana mereka sebagai pemberi layanan dan juga sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program di masyarakat tentunya menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Karena untuk mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan program di lapangan, tentu tergantung pada bagaimana ketersediaan dan peran aktif dari PLKB yang ada untuk memberi



sosialisasi atau penyuluhan serta pemahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima tujuan dari program KB itu sendiri. (Nathalia & Ndanga, 2016)

Menurut asumsi peneliti Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting dalam melaksanakan kegiatan program kampung KB. Dan juga diharapkan penambahan petugas PLKB sehingga penyuluhan, pelaksanaan pelayanan program KB, pencatatan dan pelaporan dapat terlaksana dengan baik. Penyuluhan yang diberikan oleh petugas PLKB dan KB di kota padang panjang belum maksimal terhadap pelayanan KB, kama masih kurangnya petugas PLKB dan KB di Kecamatan Siulak. Seharusnya 1 kelurahan penanggung jawab Petugas PLKB 2 Orang tetapi di wilayah kota padang panjang hanya mempunyai 7 PLKB yang bertanggung jawab atas 16 kelurahan.

Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara yang didapatkan bahwa di kampung KB alat untuk ber KB yaitu IUD, Implant, pil, kondom dan suntik sudah ada di puskesmas masing wilayah. Namun untuk tempat pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan untuk kampung kb tanah hitam dan kubu gadang masih menggunakan fasilitas umum dan rumah warga. Sedangkan untuk kampung kb koto katiak telah memiliki rumah dataku.

Dalam Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan bab 1 ketentuan umum pasal 1 No. 14, disebutkan bahwa pengertian darifasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif,

preventif (mencegah), kuratif (mengobati/memperbaiki) maupun rehabilitasi (perbaikan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Pasien akan merasa puas dalam menerima pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh peralatan medis yang lengkap, bangunan dan fasilitas yang memadai, kelengkapan sarana pendukung. Selain juga waktu tunggu dan kualitas pemberi jasa atau pegawai. Fasilitas adalah sarana dan prasarana pendukung dari sebuah layanan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian muttaqin (2016) Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu merupakan suatu wilayah yang tidak luput dari sasaran pemerintah dalam pelaksanaan program keluarga berencana yang meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi petugas keluarga berencana, peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dan peningkatan kemandirian dan pembinaan jalur swasta /mandiri. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan petugas keluarga berencana di kelurahan Jawa sudah berjalan dengan baik, seperti diadakannya pelayanan KB gratis yang diberikan dengan berkerja sama antara kelurahan Jawa dan kecamatan samarinda Ulu juga dengan kader- kader di tiap-tiap RT guna membatu terlaksananya kegiatan yang di jalankan, selain itu petugas keluarga berencana juga memberikan konseling kepada masyarakat di puskesmas dan rakor KB tentang manfaat KB, seperti memberi pemahaman bagi pasangan usia subur yang baru mau ber KB, dengan menjelaskan alat kontrasepsi apa yang cocok untuk mereka, dan mengarahkan pasangan usia subur yang sudah lama ber KB untuk menggunakan MKJP.



(Muttaqin, 2016)

Menurut asumsi peneliti bahwa sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam melaksanakan penyuluhan dan pelayanan. Prasarana berupa tempat juga berperan penting. Tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan, dan tanpa mengganggu kegiatan yang lainnya. Ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan KB akan mempengaruhi sikap masyarakat dan petugas dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan ketersediaannya sarana yang cukup seperti IUD, implant, suntik diharapkan dapat melaksanakan pemasangan alat kontrasepsi untuk PUS yang ingin ber KB semaksimal mungkin. Serta perlu dilakukan kerja sama lagi dengan lintas sektor terkait untuk memberikan tempat pelaksanaan kegiatan agar tujuan program kampung KB dalam meningkatkan keluarga sejahtera bisa tercapai.

Komponen Proses

Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa penyuluhan sering dan rutin dilaksanakan di kampung kb koto katiak dan kubu gadang oleh PLKB, kader dan petugas puskesmas. Sedangkan untuk kampung kb tanah hitam masih kurang pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan baik di kampung kb koto katiak dan kubu gadang oleh PLKB, kader dan petugas puskesmas. Sedangkan untuk kampung kb tanah hitam masih kurang pelaksanaan penyuluhannya dan kegiatannya masih belum terlaksana.

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang

diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan suseno (2011) dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need for family planning) di kota kediri, bahwa pilihan metode, kompetensi teknis tenaga kesehatan, informasi yang diberikan kepada klien hubungan interpersonal, mekanisme tindak lanjut dan kontinuitas merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan kesehatan guna peningkatan pengetahuan pengeksekutor tentang kontrasepsi dan penerimaan metode yang efektif bagi wanita, mempengaruhi pilihan metode.

Menurut asumsi penelitian bahwa partisipan yang tidak mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan disebabkan karena partisipan sendiri tidak tertarik untuk mencari informasi tentang KB kepada tenaga kesehatan atau petugas KB, tidak mengikuti penyuluhan dan tidak peduli akan kontrasepsi.

Partisipan yang mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan tidak menggunakan KB disebabkan karena ibu tidak mendapatkan izin dari



suaminya dan keluarganya untuk menggunakan KB. Seseorang yang bersikap positif terhadap keluarga berencana akan menerima informasi yang berkaitan dengan program keluarga berencana dan tempat pelayanannya. Sebaliknya, jika seseorang bersikap negatif terhadap keluarga berencana akan sulit menerima informasi tentang keluarga berencana. Terbatasnya informasi yang didapatkan akan membuat seseorang tidak bisa menerima program keluarga berencana. Penerimaan informasi tentang kontrasepsi merupakan salah satu faktor penting untuk mengatasi permasalahan kebutuhan akan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Informasi tentang kontrasepsi saat ini tidak hanya tersedia melalui petugas kesehatan, tapi bisa juga didapatkan berbagai media. Kemajuan teknologi juga memungkinkan mengakses informasi tersebut dapat berupa jenis kontrasepsi yang cocok digunakan, manfaat kontrasepsi serta kekurangan dan keuntungan jenis alat kontrasepsi.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan informasi pelaksanaan kampung kb di kota padang panjang. Ketiga-tiganya kampung kb di kota padang panjang sudah memiliki kelompok kerja (POKJA) atau struktur organisasi. Dalam pelaksanaan program kampung kb terdapat faktor penghambat dan faktor penunjang keberhasilan. Dimana untuk dua kampung kb koto katiak dan tanah hitam memiliki faktor penghambat yang sama yaitu kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Sedangkan untuk kampung kb kubu gadang yaitu masih kurang prasarana nya. Untuk faktor penunjang

keberhasilan di kampung kb koto katiak telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, sedangkan untuk kampung kb kubu gadang memiliki kampung wisata penunjangnya. PLKB dan kader harus saling bahu membahu dalam pelaksanaan program kampung KB.

Penelitian ini sejalan dengan Ndanga (2016) Pelaksanaan program keluarga berencana di kota Batu, program keluarga berencana yang merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan pemberian layanan yang layak di bidang kesehatan, serta juga sebagai salah satu bentuk untuk menekan angka pertumbuhan penduduk tentunya merupakan sebuah proses yang panjang dan memerlukan kerjasama yang baik dari pihak sehingga dalam pelaksanaannya program keluarga berencana dapat berjalan maksimal dan masyarakat benar-benar dapat di berdayakan melalui program keluarga berencana. Sesuai dengan visi dan misinya program kampung keluarga berencana sangat menekankan pada pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena pada dasarnya keluarga adalah salah satu dari kelima matra kependudukan yang tentunya sangat mempengaruhi perwujudan penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan.

Penelitian muttakin (2016) tentang pelaksanaan program kampung pelaksanaan program kampung keluarga berencana di kelurahan jawa, kecamatan samarinda ulu, hakekat dari pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan yang



terencana dan bertahap yang dilakukan oleh pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. (Muttaqin, 2016)

Mengemukakan pelaksanaan adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazim keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses pelaksanaannya.

Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang kemudian *output* kebijakandalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan Menurut Widodo (2006:19) mendefinisikan “pelaksanaan sebagai penyediaan sarana untuk menjalankan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Joner dalam Widodo (2006:22) mengartikan pelaksanaan merupakan suatu proses yang dapat dilaksanakan dengan mudah demi pen capaian tujuan yang dibuat.

Menurut asumsi peneliti pelaksanaan untuk dua kampung kb sudah menunjukkan keberhasilan, sedangkan satu kampung kb mengalami pelaksanaan program kurang berjalan. Jadi sangat dibutuhkan tenaga PLKB dan kader untuk menjalankan pelaksanaan program dengan baik dan lancar, dan saling bahu membahu antar pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan

program-program berjalan dengan lancar dan baik.

Komponen Output Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas

Dari wawancara yang dilakukan didapatkan informasi bahwa dimana dua kampung kb sudah melakukan pelaksanaan program kampung kb dengan baik dan ada kemajuan. Sedangkan satu kampung kb di padang panjang mengalami permasalahan pelaksanaan program kampung kb yang disebabkan karna SDM nya.

Penelitian ini sejalan dengan muttaqin (2016) menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Jawa Kota Samarinda sudah terlaksana, mulai dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan petugas KB kepada masyarakat yang berkerjasama dengan bidan puskesmas dan bidan swasta yang ada disekitar wilayah tersebut mereka memberikan pemahaman tentang jenis dan manfaat KB, juga dengan diadakanya kegiatan KB gratis guna meningkatkan kesertaan masyarakat untuk ikut ber KB, sehingga pilihan di berikan kepada akseptor dalam memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan dirinya dan menentukan ber KB melalui jalur pemerintah atau mandiri.

Walaupun pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda telah terlaksana namun masih terdapat hambatan yaitu kurangnya jumlah Petugas Keluarga Berencana yang ada dikelurahan sehingga penyuluhan yang di lakukan masih kurang maksimal akan tetapi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Jawa



sudah berjalan dengan baik.

Menurut asumsi peneliti dua kampung kb di kota padang panjang sudah berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan satu kampung kn mengalami kendala dalam pelaksanaan program kampung kb karena pergantian struktur kepengurusan. Dari semua hasil peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program kampung kb di kota padang panjang untuk SDM masih kurang memadai.

SIMPULAN

Diketahui Komponen Input (SDM, Sarana Prasarana, dan Kebijakan) yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang tahun 2019, yaitu kurangnya SDM, masih adanya program yang belum terlaksana dengan optimal, serta sarana dan prasana yang masih kurang memadai.

Diketahui Komponen Proses (Pelayanan dan Pelaksanaan) yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang tahun 2019, yaitu sudah banyak program kampung kb yang dilaksanakan dalam kegiatan di masyarakat.

Diketahui Komponen Output yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang tahun 2019, yaitu sudah berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan satu kampung kb mengalami kendala dalam pelaksanaan program kampung kb karena pergantian struktur kepengurusan. Dari semua hasil peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program kampung kb di kota padang panjang untuk SDM masih kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2019). *Kependudukan dan Stunting*. Jakarta. <https://www.bkkbn.go.id/>
- Karakteristik, K., Kb, K., Desa, D., Kecamatan, m., Mojokerto, S. K., & Nurjannah, N. Siti. 2018. I. P. K. K. B. (Kb) Di K. Kuningan. P. S. K. S. T. I. K. K. G. (2012). *Kajian Karakteristik Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto*.
- Maharto. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon*.
- Muttaqin, I. (2016). *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*.
- Nathalia, D., & Ndanga, Y. (2016). *Analisa Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Berencana*. 5(3), 206. www.publikasi.unitri.ac.id
- Nurjannah, S. N., & Susanti, E. (2018). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif). *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 27–33. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v9i2.64>
- Pudjirahardjo'dan, W. J., & Sopacua, E. (2016). *Kebijakan, Sebuah Kebutuhan Dalam Desentralisasi Kesehatan*.

